

Kebijakan Harian Kompas terhadap Kebijakan Afirmatif Perempuan

Fadjarini Sulistyowati
Program Studi Ilmu Komunikasi STPMD “APMD”
Jl. Timoho 317 Yogyakarta, 55221
e-mail: dzarbela@yahoo.co.id

Abstract

News does not reside in value-freed space. Mass media are powerful to make reality construction to publish that is in line with their frame (point of view). Constitution Court has made a decision that cancels chapter 214 of the Constitution, Number 10/2008, by which candidates in the legislative general election of 2009 that are elected by majority votes, and not by their numbers in rank, causing the affirmative policy for women candidates of legislative members fall invalid. As a result of the absence of affirmative policy, women candidates have to work harder to become members of the parliament. As public space, mass media are supposed to be strategic room to help women candidates campaign their struggle. Not all mass media, however, have gender sensitivity. Kompas is media that concerned with women's struggle especially on their column. This research is intended to find out Kompas's construction of post Constitution Court's decision news concerning the affirmative policy for women candidates and women's struggle to become members of People's Representatives or District People's Representatives. The data is collected by using framing analysis of Zhondang Pan and Konsicki. The result shows that Kompas is concerned with women candidates' struggle. In broad outline, the post Constitution Court's decision news is divided into two groups; they are the discourse about the affirmative policy for women candidates and the women candidates' struggle in the general election of 2009.

Abstrak

Berita tidak berada dalam ruang bebas nilai. Media massa sangat berkuasa untuk menghadirkan sebuah realitas yang sejalan dengan bingkai atau sudut pandang mereka. Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang membatalkan pasal 214 Konstitusi, Nomor 10/2008. Kandidat di legislatif pemilihan umum tahun 2009 yang dipilih oleh suara terbanyak, dan bukan oleh jumlah mereka dalam peringkat, menyebabkan kebijakan afirmatif untuk calon perempuan anggota legislatif. Hasil dari tidak adanya kebijakan afirmatif, kandidat perempuan harus bekerja lebih keras untuk menjadi anggota parlemen. Sebagai ruang publik, media massa seharusnya menjadi ruang strategis untuk membantu kandidat perempuan mengampanyekan perjuangan mereka. Tidak semua media massa memiliki sensitivitas gender. Kompas adalah media yang peduli dengan aspek perjuangan perempuan, hal ini ditunjukkan pada kolom berita. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konstruksi Kompas tentang keputusan pasca pengadilan yang menampilkan berita mengenai kebijakan afirmatif untuk calon perempuan dan perjuangan perempuan untuk menjadi anggota Perwakilan Rakyat pada level perwakilan di tingkat Kabupaten. Data dikumpulkan dengan menggunakan analisis *framing* dari Zhondang Pan dan Konsicki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompas berkaitan dengan perjuangan kandidat perempuan. Secara garis besar, berita keputusan pasca Mahkamah Konstitusi dibagi menjadi dua kelompok yaitu wacana tentang kebijakan afirmatif bagi kandidat perempuan dan perjuangan para kandidat perempuan dalam pemilihan umum tahun 2009.

Kata kunci: analisis *framing*, kebijakan afirmatif, dan perjuangan perempuan

Pendahuluan

Upaya gigih gerakan perempuan untuk tetap bersikukuh merealisasikan bentuk konkret peran perempuan pada sektor publik laksana perjuangan yang tidak pernah kunjung usai. Pada sektor politik, isu penting yang terus mereka dorong adalah kebijakan afirmatif (*affirmative action*) berupa kuota 30 persen kursi di parlemen diisi oleh politisi perempuan. Isu kebijakan afirmatif mulai gencar diusulkan pada tahun 2002 yang kemudian berhasil diakomodasi dan menghasilkan kebijakan afirmatif dalam Pemilu 2004. Ternyata, pada Pemilu 2004, buah dari kebijakan afirmatif tersebut hanya mampu menyertakan 11 persen perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 9 persen di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi (DPRD), dan 6 persen di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten atau kota, (Kompas, 25 Agustus 2008).

Kebijakan afirmatif yang diformulasikan kuota 30 persen memang bukan perjuangan yang mudah dan sederhana. Kebijakan afirmatif memunculkan banyak perdebatan pro-kontra. Para pendukung kebijakan afirmatif memiliki rasionalisasi bahwa sudah seharusnya muncul kebijakan (baca: afirmatif) terhadap perempuan.

Hal ini terjadi karena peran perempuan sangat kecil dalam kehidupan politik, Akibatnya bila direpresentasikan melalui parlemen terjadi ketidakberimbangan terlebih bila dikomparasikan dengan fakta rasio jumlah penduduk laki-laki-perempuan. Implikasinya terutama isu-isu yang dihadapi perempuan tidak terartikulasikan secara memadai di parlemen.

Padahal kondisi sosial politik di Indonesia memperlihatkan kecenderungan kuat bahwa sekadar menyerahkan keterwakilan perempuan semata-mata dengan cara melangsungkan pertarungan yang berimbang (melalui pemilu) terbukti tidak kontributif terhadap posisi perempuan di parlemen.

Pada sisi lain, tidak sedikit pula pandangan yang beranggapan bila perempuan menyatakan kesetaraan yang sama dengan laki-laki. Konsekuensinya mereka sudah selayaknya tidak memerlukan kebijakan afirmatif yang berpihak. Keberpihakan itu justru diartikan pengaburan atas

makna kesetaraan laki-laki-perempuan. Kebijakan afirmatif terhadap perempuan berupa kuota 30 persen akhirnya berhasil ditetapkan sekalipun diiringi perdebatan yang tidak sepenuhnya tuntas. Namun, kebijakan afirmatif yang semula melegakan aktivis gerakan perempuan tidak bertahan lama. Pada Pemilu 2009, keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal 214 Undang-Undang No. 10/2008 sehingga calon legislatif terpilih pada Pemilu 2009 tidak bisa didasarkan atas nomor urut namun harus meraih suara terbanyak.

Bagi gerakan perempuan keputusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan implikasi negatif yang cukup besar pada calon legislatif perempuan. Apabila dalam Pasal 554 Undang-Undang No. 10/2008 dinyatakan sedikitnya dari setiap tiga calon yang diajukan oleh partai politik. Salah satu di antaranya adalah calon legislatif (caleg) perempuan maka penerapan pasal ini menjadi batal karena penetapan calon terpilih tidak lagi berdasarkan sistem nomor urut melainkan suara terbanyak.

Kebijakan afirmatif terhadap perempuan di parlemen menjadi tidak berlaku dalam pemilu 2009 ini. Bagi aktivis gerakan perempuan keputusan Mahkamah Konstitusi ini dinilai telah menghancurkan kebijakan afirmatif yang mereka perjuangkan sejak 2002. Menurut Soetjipto, kebijakan afirmatif bagi perempuan di Indonesia masih diperlukan karena masih minimnya jumlah perempuan di parlemen yang tentunya akan berefek pada minimnya kebijakan yang hadir untuk perlindungan perempuan (Kompas 10 Februari 2009).

Keputusan Mahkamah Konstitusi ini menjadikan posisi calon legislatif laki-laki dan perempuan setara, tanpa ada kuota yang dikuatkan ketentuan yuridis. Politisi atau caleg perempuan untuk meraih suara terbanyak terpaksa harus berjuang ekstra. Bagaimana pun posisi mereka cenderung lebih lemah, untuk itu isu kebijakan afirmatif memiliki relevansinya baik dari segi kekuatan finansial maupun kemampuan mengorganisasikan massa (selama ini dikonsentrasikan pada wilayah privat). Ketika negara tidak memberikan kebijakan afirmatif terhadap caleg perempuan maka, korelasinya adalah semakin sempit ruang

gerak perempuan menunjukkan perannya di sektor publik.

Media massa memiliki pengaruh dalam pembentukan opini. Kebijakan media menyediakan ruang bagi perempuan yang merupakan ruang publik memiliki kontribusi mendorong mereka dalam menyampaikan informasi dan isu-isu perempuan. Kemampuan gerakan perempuan untuk mengakses dan menjaga relasi media tentu sesuatu yang positif bagi perjuangannya. Sesuai dengan pendapat Gerbner media massa itu mampu menciptakan khalayak-khalayaknya membuat definisi terhadap isu, membuat istilah umum dari suatu pengetahuan sehingga dengan demikian media massa itu dapat menarik perhatian dan memiliki kekuatan (Novianti, 2006).

Bila kebijakan negara tidak mereka dapatkan, maka media massa seharusnya menyediakan ruang bagi mereka untuk dapat menyampaikan informasi kepada publik. Apalagi, ternyata, dari keseluruhan jumlah pemilih yang terdata, 57 persen pemilih adalah perempuan (Kompas, 31 Januari 2009).

Selain itu kemampuan media menyihir pembacanya menurut Gamson dan Modigliani (dalam Sudibyo, 2001: 187) karena media dapat menerapkan standar kebenaran, matrik objektivitas serta batasan-batasan etika tertentu dalam mengolah dan menyuguhkan berita. Untuk itu media memiliki kemampuan dalam menyajikan fakta dengan konstruksi mereka.

Melalui harian Kompas yang memuat berita-berita tentang calon legislatif perempuan, peneliti mencoba melihat bingkai yang digunakan media tersebut. Kompas sebagai media cetak, merupakan media yang cukup memiliki pengalaman dan dianggap media yang cukup independen. Keberpihakan Kompas terhadap perempuan, ditunjukkan dengan menyediakan ruang khusus yakni Swara. Swara untuk menyajikan informasi khusus tentang gerakan perempuan. Kompas dalam memberitakan kebijakan afirmatif calon legislatif perempuan seharusnya memiliki kebijakan yang berpihak agar suara mereka lebih bisa didengar masyarakat luas.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini ingin mengetahui bagaimanakah konstruksi harian Kompas terhadap berita-berita kebi-

jakan afirmatif calon legislatif perempuan pasca keputusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilu 2009?

Ada tiga argumen yang mendukung untuk keterwakilan perempuan dalam dunia politik (Joni Lovensduki, 2005:48-52): pertama, argumen keadilan, menyatakan sangatlah tidak adil jika kaum laki-laki memonopoli perwakilan terutama di suatu negara yang menganggap dirinya sebagai negara demokrasi; kedua, argumen pragmatis yang memanfaatkan gagasan mengenai para politisi rasional yang memaksimalkan jumlah suara. Argumen ini mendorong isu bahwa keterwakilan perempuan politik akan menjadi lebih konstruktif dan ramah; ketiga, argumen perdebatan, yang intinya memiliki pandangan bahwa perempuan akan membuat gaya dan pendekatan yang berbeda dalam politik, sehingga akan mengubahnya menjadi lebih baik dan menguntungkan semua pihak.

Salah satu alasan logis yang senantiasa disampaikan para feminis adalah upaya memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada perempuan dengan menempatkan perempuan dalam posisi pengambil kebijakan itu sendiri atau dalam keterwakilan politik. Seperti yang disampaikan oleh Barbara B. Watson kunci pemberdayaan perempuan adalah peran dan kedudukan. Sedangkan peran merupakan seperangkat tindakan dan tingkah laku yang ditentukan oleh norma, hukum dan kekuasaan. Kedudukan, adalah suatu posisi yang disediakan lingkungan dan memiliki pengaruh dan akibat terhadap individu atau kelompok (Dzuhayatin, 1996: 88-89).

Di Indonesia, perjuangan perempuan untuk masuk ke wilayah publik mempunyai kendala cukup besar karena faktor budaya yang memposisikan perempuan di wilayah *privat*. Untuk itu, Fakih (2001: 180) menyatakan bahwa persoalan paling besar yang memberikan sumbangan pada kegagalan memperjuangkan hak asasi perempuan adalah faktor substansi kebijakan negara dan juga lemahnya kesadaran kritis kaum perempuan sendiri. Didukung pendapat Mernissi (1999: 14-16) yang mengatakan ia menemukan tidak terorganisirnya perempuan menjadi kendala utama. Oleh sebab itu kelompok masyarakat perempuan tidak mempunyai kekuasaan sehingga mudah menjadi

target strategis para birokrat dalam melumpuhkan kemerdekaan sipil perempuan untuk turut serta menentukan persoalan-persoalan publik.

Joni Lovendski (2005: 88) menyampaikan hambatan perempuan untuk masuk politik sebagai rintangan sosial perempuan. Menurutnya, perempuan mengalami tiga rintangan sosial menjadi pelaku politik: pertama, sumber daya yang diperlukan memasuki politik yang lebih lemah; kedua, bermacam-macam kekangan gaya hidup menyebabkan perempuan memiliki waktu lebih sedikit daripada laki-laki dan ketiga, tugas dunia politik diasumsikan sebagai dunia laki-laki sehingga merintangi rekrutmen mereka untuk masuk.

Seperti yang disampaikan Mernissi dalam Riyadi (2005: 13) terdapat dua hal yang bisa dilakukan perempuan melakukan perjuangan di ruang publik (politik): pertama, dibutuhkan keberadaan organisasi yang kuat, mandiri, rasional, partisipatif, dan bebas dari bias cara pandang laki-laki; kedua, kecerdasan melakukan wacana atau pendominasian ide-ide transformatif dalam berbagai bentuknya.

Untuk memunculkan organisasi perempuan yang kuat yang mampu mendukung gerakan perempuan tidak mudah. Organisasi perempuan kebanyakan memiliki problem yang seragam yakni kualitas SDM dan ketergantungan terhadap lembaga donor. Sehingga organisasi perempuan cukup efektif memperjuangkan hak-hak perempuan tidaklah banyak. Upaya lain dengan selalu mengkampanyekan gerakan perempuan melalui media massa.

Peran media massa adalah menyampaikan informasi kepada publik berdasarkan peristiwa dan pendapat dalam masyarakat. Media massa menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi wacana yang memiliki makna. Media massa merupakan institusi yang memiliki kekuatan mengkampanyekan berbagai fenomena, termasuk gerakan perempuan. Media bukanlah ruang hampa sehingga untuk mengharapkan kerja jurnalisme dalam praktiknya sesuai dengan elemen jurnalisme pada kenyataannya menghadapi kompleksitas tertentu. Pada satu sisi media membentuk realitas politik, tetapi bersamaan dengan itu di sisi lain, realitas politiklah yang memengaruhi media. Hal yang sama terjadi pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Proses ini disebut Grossberg (1998: 7), sebagai *mediamaking*. Terminologi *mediamaking* menyiratkan bahwa ketika media dibentuk pada saat yang bersamaan media membentuk sesuatu yang lain.

Demikian pula dalam pembuatan berita, sesuai dengan pendapat Pamela J. Shoemaker dan Stephen D Reese proses pembikinan berita (*newsroom*) bukanlah ruang hampa dan netral namun ada beberapa hal yang mempengaruhi: Pertama, faktor individual, yakni faktor yang berhubungan dengan latar belakang profesional. Level individual akan berpengaruh pada aspek-aspek personal dari pengelola media misalnya: agama, umur, dan jenis kelamin. Kedua, faktor level rutinitas media yakni berhubungan dengan mekanisme dan rutinitas penentuan berita. Setiap media memiliki ukuran sendiri tentang apa yang disebut berita, ciri-ciri berita, ukuran kelayakan berita dan kesemuanya ini sudah menjadi rutinitas media. Ketiga, faktor level organisasi, berhubungan dengan struktur organisasi yang secara hipotetik mempengaruhi pemberitaan. Pengelola media dan wartawan bukanlah orang yang tunggal dalam organisasi berita sebaliknya, ia hanyalah bagian kecil organisasi media. Keempat, level ekstra media yang meliputi; sumber berita, sumber penghasilan, pihak eksternal, dan faktor ideologi (Sudibyo, 2003: 13).

Media bukan sebagai saluran yang bebas dan netral karena media bisa menjadi alat dari kelompok dominan tetapi media juga memproduksi ideologi dominan. Media membantu kelompok dominan menyebarluaskan gagasannya, mengontrol kelompok lain dan membentuk *consensus* (Eriyanto, 2006: 36). Akibatnya, media juga memiliki kekuatan untuk mengkonstruksikan realitas sesuai dengan keinginan mereka. Menurut Bennet (dalam Eriyanto, 2006: 36), media adalah agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas sesuai dengan kepentingannya.

Konstruksi media sangat dipengaruhi bahasa. Menurut Hamad (2004: 11-12) “Bahasa adalah unsur utama dalam penyajian pesan lewat media massa. Bahasa adalah instrumen utama menceritakan realitas, bahasa ini meliputi bahasa verbal (kata-kata tertulis atau lisan) maupun bahasa nonverbal (gambar, foto, gerak-gerik, grafik, angka dan tabel)”.

Metode Penelitian

Objek analisis dalam penelitian ini adalah teks berita calon legislatif perempuan pada masa kampanye Pemilu 2009 di Harian Kompas. Digunakannya analisis teks berita karena data teks dapat menjadi cerminan situasi dan kondisi yang dikonstruksi media. Harian Kompas dipilih karena dianggap sebagai koran independen dan merupakan salah satu media yang memiliki keberpihakan terhadap perempuan. Periode waktu yang dipilih antara bulan Desember 2008 (saat keputusan MK keluar) hingga tanggal 5 April 2009 (masa kampanye selesai). Data yang dikumpulkan sejak bulan Desember hingga Maret 2009. Berita yang dipilih adalah berita langsung (*straight news*). Berdasarkan data berita tentang calon legislatif perempuan dengan mengangkat dua tema utama yakni: kebijakan afirmatif pasca putusan MK dan perjuangan calon legislatif perempuan dalam masa pemilu 2009.

Teknik analisis data menggunakan analisis framing yang disampaikan oleh Zhongdang Pan dan Kosicki. Pan dan Kosicki membuat suatu model dengan mengintegrasikan secara bersama-sama konsep psikologis dengan konsepsi sosiologis. Dalam pendekatan ini perangkat *framing* dapat dibagi ke dalam empat struktur besar: *pertama*, struktur sintaksis, struktur ini berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa. Struktur semantik, dapat diamati dari lead, latar lead dan sebagainya. *Kedua*, struktur skrip berhubungan dengan bagaimana wartawan mengisahkan peristiwa ke dalam bentuk berita. *Ketiga*, struktur tematik, berhubungan dengan bagaimana wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa dalam proposisi, kalimat atau hubungan antar kalimat. *Keempat*, struktur retorik, berhubungan dengan bagaimana wartawan menekankan arti tertentu ke dalam berita.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Keberpihakan Kompas terhadap Kebijakan Afirmatif Perempuan

Berdasarkan analisa berita, tampak keberpihakan Kompas untuk mendukung perjuangan

an calon legislatif perempuan. Keberpihakan Kompas bukan hanya muncul pada berita-berita *straight news* tetapi pada analisis Politik, yang disampaikan oleh J. Kristiadi dan juga pada forum spanduk caleg. Analisis politik J. Kristiadi dengan judul *Suara Terbanyak dan Nasib Perempuan* pada tanggal 27 Januari 2009, secara eksplisit mendukung kebijakan afirmatif pada caleg perempuan.

Pada tema-tema berita yang berkaitan dengan kebijakan afirmatif caleg perempuan, tampak kebimbangan Kompas. Secara garis besar Kompas pada prinsipnya mendukung Keputusan Mahkamah Konstitusi karena keputusan suara terbanyak sesuai dengan prinsip demokrasi. Salah satu contoh kebimbangan Kompas bisa dilihat pada analisis berita dengan judul: "Putusan MK merugikan caleg perempuan".

Kompas menganggap kebijakan Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi terhadap caleg perempuan, namun suara pemilih merupakan hal yang penting sehingga keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengakomodasi suara terbanyak sangat sesuai pada prinsip demokrasi. Ada dua hal yang disampaikan Kompas, yakni keberpihakan pada suara perempuan dengan menyebutkan adanya implikasi terhadap caleg perempuan namun suara mayoritas kebanyakan laki-laki perlu diapresiasi karena begitulah konsep negara demokrasi, suara rakyat suara Tuhan.

Dari hal ini tampak Kompas sebagai media massa mencoba melakukan frame namun secara samar. Sebagai media yang memiliki kepedulian terhadap perempuan Kompas menyuarakan gerakan perempuan. Hal ini tergambar jelas dari judul: *...merugikan caleg perempuan*. Keberpihakan Kompas terhadap caleg perempuan secara skematik tampak dalam pemilihan narasumber dan panjangnya kutipan masing-masing narasumber. Penempatan pernyataan Eva Kusuma sebagai judul merupakan skematik yang diarahkan Kompas terhadap teks berita ini. Demikian juga dalam *lead*nya, kutipan dari Eva Sundari disampaikan secara lengkap, berikut *lead* berita tersebut:

Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pemakaian sistem nomor urut dalam penetapan calon anggota legislatif dinilai merugikan caleg perempuan...Pasalnya

penghapusan sistem nomor urut membuat perlakuan khusus....terhadap perempuan melalui...kuota 30 persen tidak efektif. Putusan ini dinilai...melanggengkan nilai patriarkhis.

Kompas yang memiliki sikap pro demokrasi, mengkonstruksikan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi bukan sebagai keputusan keliru dikarenakan, keputusan ini mengembalikan kedaulatan pemilih sesuai dengan konsep negara demokrasi. Sehingga, Kompas dalam teks berita ini tidak menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pihak yang turut memberikan andil dalam mengeluarkan putusan yang merugikan perempuan. Walaupun dalam judul berita dicantumkan Putusan Mahkamah Konstitusi merugikan caleg perempuan namun ditepis pada alenia kelima, yakni adanya pernyataan dari Mahkamah Konstitusi yang mengatakan mereka tidak membatalkan ketentuan tentang kuota 30 persen.

Kompas mendukung kebijakan afirmatif karena kebijakan ini memang seharusnya tidak dihilangkan sesuai dengan pernyataan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan Kompas sebagai pihak yang tidak bersalah namun dalam teks ini Komisi Pemilihan Umum yang dibingkai Kompas sebagai lembaga yang tidak siap mengantisipasi kasus-kasus Pemilu. Kutipan Komisi Pemilihan Umum yang ditempatkan di akhir teks, menguatkan asumsi bahwa bagi Kompas pernyataan dari Komisi Pemilihan Umum tidaklah terlalu penting. Komisi Pemilihan Umum dianggap tidak bisa memberikan penjelasan yang bisa menjawab keresahan caleg perempuan.

Dilihat dari skrip, teks ini disusun bukan didasarkan atas peristiwa tetapi teks berita ini merupakan pendapat-pendapat yang dikumpulkan dari beberapa narasumber yang dipilih Kompas. Pemicu utama kemunculan teks ini adanya gerakan dari para aktivis pergerakan perempuan menolak putusan Mahkamah Konstitusi dua hari sebelumnya. Kompas sengaja memilih isu penolakan dari aktivis perempuan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebagai ujud keberpihakan Kompas terhadap pemberdayaan perempuan.

Kompas sebagai media bukanlah bebas nilai namun sesuai Shoemaker dan Reese (2003:

13), proses pembikinan berita (*newsroom*) bukanlah ruang hampa dan netral, Kompas membingkai berita dengan tujuan ikut memberikan dukungan untuk memperjuangkan kebijakan afirmatif apalagi didukung dengan alasan yang ada pada pernyataan Eva Sundari. Secara tematik, keputusan Mahkamah Konstitusi dapat muncul tanpa adanya kebijakan afirmatif terhadap perempuan karena dunia politik dianggap sebagai dunia laki-laki yang tidak berfikir untuk mengakomodasi keberpihakan, demikian makna yang muncul ketika Kompas mengambil pernyataan Eva Sundari "Putusan itu dinilai melanggengkan nilai patriarkhis". Kata *Patriarkhis*, bermakna bagaimana dunia ini dibentuk sesuai budaya yang berpihak laki-laki. Pandangan ini muncul dari gerakan feminisme, Kompas mengarahkan *angle* berita pada pandangan ini. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan aktivis perempuan, "Perempuan butuh upaya afirmatif di lembaga legislatif karena kondisinya saat ini tidak berimbang". Kata tidak berimbang memiliki makna adanya ketimpangan antara dunia laki-laki dan perempuan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Lovenduski yang menyampaikan hambatan perempuan untuk masuk politik sebagai rintangan sosial perempuan. Salah satu faktor penyebabnya adalah persepsi bahwa dunia politik adalah dunia laki-laki. Hal tersebut membuat perjuangan perempuan memang menjadi berat sehingga kebijakan afirmatif menjadi penting untuk dikeluarkan.

Bingkai Kompas untuk pro kebijakan afirmatif semakin jelas bila dilihat dari retorik teks berita yang muncul di penggunaan kata-kata tertentu, misalnya kata yang mengesankan hiperbola: *runtuh, digembosi, putus tengah jalan*. Keputusan Mahkamah Konstitusi menjadi penghalang karena dianggap telah melemahkan upaya perjuangan menempatkan posisi perempuan di level kebijakan. Penggunaan kata-kata ini memperkuat asumsi perjuangan perempuan telah menemui jalan buntu tanpa adanya kebijakan afirmatif.

Kompas Mendukung Usaha-Usaha Caleg Perempuan

Kompas dalam pemberitaan kampanye para caleg perempuan memiliki keberpihakan

tinggi. Tampak dari perhatian Kompas terhadap usaha-usaha calon legislatif perempuan, salah satunya dapat dilihat pada berita dengan judul: “Perempuan harus turun ke lapangan” yang dimuat harian Kompas pada tanggal 22 Januari 2009.

Kompas menekankan pentingnya keberadaan perwakilan perempuan di dalam DPR atau DPRD karena perempuan memiliki kompetensi seperti halnya laki-laki. Untuk itu melalui kalimat “Perempuan harus turun ke lapangan”, Kompas mendorong mereka untuk turun menyapa massa mereka. Dukungan Kompas dilanjutkan dalam *lead* berita.

Kompas tampaknya sengaja tidak menggunakan kata caleg perempuan namun digantikan kata perempuan. Kata ini dipakai sebagai pendukung bahwa perjuangan caleg perempuan ini sama halnya dengan perjuangan kaum perempuan secara keseluruhan. Pada *lead*, Kompas memberi penekanan posisi semua caleg dengan sistem suara terbanyak adalah sama, sehingga perempuan bila ingin berhasil juga harus melakukan kerja keras. Dorongan Kompas terhadap pemberdayaan masih muncul pada alinia ketiga.

Kompas sengaja membingkai bahwa kebijakan hukum untuk perlindungan caleg perempuan tetap harus dilakukan dan perjuangan itu menjadi tugas utama perempuan. Tujuan utama dari semua upaya ini adalah peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen. Keterwakilan perempuan dalam parlemen memiliki peran strategis untuk penentuan kebijakan.

Keterwakilan perempuan menempatkan peran dan status perempuan menjadi lebih dihargai. Merujuk pendapat para feminis, upaya untuk memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada perempuan adalah menempatkan perempuan dalam posisi pengambil kebijakan itu sendiri atau dalam keterwakilan politik. Seperti yang disampaikan oleh Barbara B. Watson, kunci pemberdayaan perempuan adalah peran dan kedudukan. Peran merupakan seperangkat tindakan dan tingkah laku yang ditentukan oleh norma, hukum dan kekuasaan. Sedangkan kedudukan, adalah suatu posisi yang disediakan lingkungan dan memiliki pengaruh dan akibat terhadap individu atau kelompok. Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perempuan inilah Kompas mendorong usaha-usaha caleg perempuan.

Secara keseluruhan teks berita ini, menempatkan keberpihakan Kompas pada perjuangan perempuan. Narasumber berita terdiri dari empat orang yang semuanya perempuan. Dengan latar belakang sebagai aktivis, akademisi maupun caleg perempuan sendiri. Pernyataan Lena Maryana diletakkan sebagai judul dan *lead*. Penempatan ini dimungkinkan karena Kompas menilai pernyataan Lena bisa mendorong caleg perempuan untuk optimis. Pernyataan ini sesuai dengan bingkai Kompas terhadap pemberdayaan perempuan. Lena Maryana cukup kritis memberikan pendapat dan meminta KPU (komisi pemilihan umum) untuk turut memperjuangkan keterwakilan perempuan. Pernyataan Lena Maryana ini diperkuat dari kalangan akademisi perempuan yang berpihak pada perjuangan perempuan, Ani Sutjipto dan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat perempuan, Aisah Putri.

Dilihat dari skrip, teks berita ini merupakan pengembangan dari acara dialog publik “Representasi perempuan pasca uji materi” yang salah satu narasumbernya Lena Maryana, sehingga berita ini memfokuskan pada pernyataan Lena yang kemudian diperdalam dengan menambahkan wawancara kepada narasumber lain. Kompas memfokuskan pada sudut pandang yang berpihak pada pemberdayaan caleg perempuan.

Strategi penulisan teks ini memfokuskan pada usaha-usaha yang perlu dilakukan caleg perempuan. Upaya caleg perempuan terjun ke daerah pemilihan merupakan salah satu cara untuk, membuktikan kompetensinya pada pemilih mereka. Selain itu, perjuangan juga tetap dilakukan melalui tuntutan kebijakan hukum. Dengan menempatkan pada apa (*what*) sebagai *angle* (sudut pandang berita) Kompas mengkonstruksikan bahwa caleg perempuan memiliki kompetensi yang mampu bersaing memasuki parlemen.

Tematik, teks berita ini menempatkan level sistem pemilu sebagai pihak yang bertanggung jawab. Penggunaan frase “sistem pemilu yang menerapkan suara terbanyak” sehingga pada alinia pertama berita menjelaskan bahwa sistem yang mengharuskan setiap caleg harus turun ke bawah. Demikian pula dengan caleg perempuan juga harus turun ke daerah pemilihan-

nya. Sistem ini berat bagi semua caleg terlebih lagi caleg perempuan karena setiap calon wakil rakyat ternyata bukan orang yang telah di-kenal pemilihnya sehingga mereka harus turun ber-audiensi dengan massa. Hal ini tentunya mem-butuhkan kemampuan modal dan tenaga yang besar. Akibatnya, penerapan suara terbanyak yang munculnya mendekati masa pilihan mem-buat banyak pihak tidak siap karena sistem itu mengharuskan mereka dikenal oleh pemilihnya.

Secara retorik, beberapa kata yang dipakai merupakan kata yang memberikan pemihakan pada perempuan. Penggunaan kata perempuan dianggap sebagai pernyataan bahwa hal ini tidak hanya menyangkut caleg perempuan namun juga perempuan secara keseluruhan. Kata-kata: “pe-luang perempuan semakin kecil” menyiratkan perempuan dengan sistem suara terbanyak inilah yang memiliki peluang semakin berat. Kata yang lain: “proses pemilu yang tidak ramah pada perem-puan”, menyiratkan hal yang sama. Dari kata-kata ini menyiratkan adanya perbedaan peluang anta-ra laki-laki dan perempuan dalam mencapai kedu-dukan sama, karena berbeda maka Kompas sa-ngat mendukung kelompok yang lemah. Media dalam hal ini Kompas memiliki peran untuk men-sosialisasikan nilai-nilai kesetaraan gender.

Sesuai dengan peran tersebut, Kompas mencoba melawan arus, dari teori bahwa media menjadi alat dari kelompok dominan tetapi media juga memproduksi ideologi dominan. Media membantu kelompok dominan menyebarluaskan gagasannya, mengontrol kelompok lain dan mem-bentuk konsensus (Eriyanto, 2006:36). Dalam hal ini, Kompas bahkan mencoba memberikan gaga-san untuk mendukung kelompok yang senatiasa terpinggirkan dalam dunia politik untuk bersaing. Kompas mencoba mengkonstruksikan realitas, menjalankan peran menjadi agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas sesuai dengan ke-pentingannya seperti yang diungkapkan oleh Tony Bennet. Dukungan Kompas terhadap perjuangan caleg perempuan secara jelas tampak dalam berita dengan judul: “Caleg perempuan jangan saling sikut”, dimuat pada harian Kompas tanggal 4 Ma-ret 2009. Kompas secara eksplisit mendukung usaha-usaha caleg perempuan.

Kompas tampak konsisten mendukung pemberdayaan perempuan, dilihat dari judul, teks

berita ini lebih memfokuskan untuk memberikan dorongan kepada caleg perempuan. Kompas me-nekankan kepada caleg perempuan untuk menyatukan diri dan tidak saling menjatuhkan.

Narasumber teks berita ini ada tiga orang yang semuanya perempuan dengan latar bela-kang yang berbeda; Sri Nuryanti sebagai ang-gota KPU, Erna Witoelar aktivis perempuan dan Irman Lanti, *programme manager United Na-tion Development Program*. Dilihat dari na-rasumbernya, tampak jelas teks berita ini memang merupakan upaya mendukung perjuangan caleg perempuan dalam pemilu. Teks berita diambil dari *angle* kegiatan Rembug Nasional Perempuan In-donesia. Kegiatan yang menurut Kompas dapat menjadi ruang konsolidasi antar caleg perempuan, sehingga ada sinergi di antara mereka. Upaya mengangkat acara tersebut merupakan salah satu pemihakan Kompas terhadap perjuangan caleg perempuan.

Dari analisis skrip, alasan (*why*) perem-puan harus saling bersinergi dan tidak saling sikut disampaikan dalam alenia tiga dan empat. Seperti yang disampaikan oleh Erna Witoelar, pada alenia ketiga “.....keberadaan perempuan dalam jumlah yang lebih signifikan di parlemen me-mudahkan untuk melakukan perubahan. Para caleg perempuan didorong untuk bekerjasama. Atau kutipan dari pernyataan Erna Witoelar, kenya-taannya, perempuan lebih mudah keluar dari kotak-kotak (partai politik) dan berjejaring dengan pelaku lain atau sesama perempuan” Kutipan pen-dapat ini menguatkan peran perempuan dalam legislatif.

Sesuai dengan pendapat Mernissi ada dua hal yang bisa dilakukan perempuan untuk me-lakukan perjuangan di ruang publik (politik): per-tama, dibutuhkan keberadaan organisasi yang ku-at, mandiri, rasional, partisipatif, dan bebas dari bias dan cara pandang laki-laki; kedua, kecerdasan melakukan wacana atau pendominasi-an ide-ide transformatif dalam berbagai bentuknya. Upaya memunculkan organisasi yang kuat bukan perkara mudah namun untuk memunculkan wacana bisa dilakukan perempuan melalui media massa. Kompas dalam hal ini memberikan ruangnya untuk mendukung caleg perempuan.

Caleg perempuan mendapat perhatian dari lembaga donor *United Nation Development*

Program, dukungan lembaga ini diberikan dalam menggugah kesadaran masyarakat bahwa memiliki keterwakilan perempuan dalam parlemen itu penting. Dari alinia ini, maka Kompas memberikan bingkai bahwa dukungan terhadap keterwakilan perempuan di parlemen juga dilakukan oleh negara-negara lain bahkan lembaga internasional semacam *United Nation Development Program*. Dari narasumber *United Nation Development Program* tersirat acara rembug nasional ini sendiri sebetulnya mendapatkan dana dari *United Nation Development Program*, namun Kompas tidak menyampaikan secara eksplisit. Dengan menyamarkan adanya donor, Kompas ingin mengesankan bahwa acara ini merupakan inisiatif para caleg perempuan sendiri untuk menyatukan pendapat.

Secara tematik, Kompas menyusun teks berita ini sebagai upaya mendukung usaha-usaha caleg perempuan untuk masuk dalam parlemen. Beberapa upaya yang harus dilakukan perempuan diuraikan di awal berita: jangan saling sikut, saling bersinergi, didorong untuk bekerjasama. Dalam alenia kelima, Kompas menyampaikan data kenaikan tentang jumlah anggota parlemen perempuan dari tahun 2004 sampai 2009. Latar ini mengisyaratkan bila perempuan melakukan usaha-usaha yang disampaikan maka terjadi peningkatan jumlah perwakilan perempuan di parlemen.

Alinia berikutnya, Kompas menekankan tentang dukungan lima negara donor terhadap perjuangan caleg perempuan. Ada koherensi antara perjuangan para aktivis dengan *United Nation Development Program*, yakni karena alasan perempuan lebih bisa memperjuangkan anak dan rakyat kecil. Dalam teks ini Kompas juga menekankan tentang ikrar bersama untuk para caleg perempuan untuk memperjuangkan anak-anak, keluarga miskin dan mendirikan pusat krisis korban kekerasan. Bagi Kompas, kaum perempuanlah yang memiliki peran signifikan untuk memperjuangkan kemiskinan dan anti kekerasan.

Secara retorik, penggunaan beberapa kata merupakan pemihakan terhadap caleg perempuan, contohnya: ... cita-cita meningkatkan keterwakilan perempuan. Kata cita-cita dipakai atas nama semua perempuan, atau kalimat: keberadaan perempuan akan memudahkan untuk

perubahan, klaim adanya perempuan bisa memunculkan perubahan. Kata-kata ini dipakai sebagai upaya untuk mengesankan keterwakilan perempuan itu penting.

Keberadaan foto dalam teks berita untuk mendukung teks itu sendiri. *Angle* foto tentunya memiliki maksud tertentu demikian pula dengan teks ini. Penggunaan foto dalam teks berita ini lebih memfokuskan pada gambar latar (*background*) dari rembug nasional. Gambar-gambar yang berupa poster kegiatan perempuan ini memperlihatkan aktivitas perempuan, sehingga tujuan menampilkan foto ini untuk memperlihatkan berbagai aktivitas perempuan yang dapat dilakukan bila mereka menjadi wakil rakyat dan duduk di parlemen.

Simpulan

Kompas telah menjalankan beberapa peran media massa. Kompas menampilkan peristiwa yang terjadi sebagai cermin masyarakat. Kompas memiliki filter atas terjadinya peristiwa sehingga apa yang ditampilkan dalam berita bukanlah realitas sesungguhnya namun dalam bingkai Kompas.

Kompas mendukung kebijakan afirmatif caleg perempuan tetapi tidak menganggap keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang ketentuan suara terbanyak sebagai keputusan yang salah. Bagi Kompas, keputusan MK dianggap pilihan tepat untuk mengakomodasi suara rakyat. Selain itu, secara eksplisit Kompas memberikan dukungan para caleg perempuan agar terus berusaha agar bisa menduduki kursi di parlemen. Bingkai yang dilakukan Kompas ini sesuai dengan misinya untuk menjadi agen perubahan. Dengan demikian Kompas cukup konsisten dalam melakukan keberpihakan terhadap perempuan sesuai dengan misi disediakannya suplemen rubrik Swara.

Daftar Pustaka

Dzuhayatin, Siti Ruhaini, 2000, *Kajian Jender di Perguruan Tinggi Islam Indonesia: Catatan dari PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Dalam Komaruddin Hidayat dan Hendro Prasetyo (ed), *Problem dan*

- Prospek IAIN Antologi Pendidikan Tinggi Islam*, Departemen Agama RI, Jakarta.
- Eriyanto, 2002, *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*, LKiS, Yogyakarta.
- Fakih, Mansour, 2001, Hak Asasi Perempuan, dalam *Jurnal Ilmu Sosial Transformasi Wacana, Edisi hak Asasi Manusia: Antara Skenario Kemanusiaan dan Proyek Global*, Nomor 8 Tahun II.
- Grossber, Lawrence, Ellen Wartella dan D. Charles Whitney, 1998, *Mediamaking: Mass Media a Popular Culture*, Sage Publications Ins., California
- Hamad, Ibnu, 2004, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*, Granit, Jakarta.
- Lovenduski, Joni, 2008, *Politik Berparas Perempuan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Novianti, Dewi, 2006, "Wacana Media dalam Kasus Bom Bali Pertarungan Wacana Harian Republika dan Harian Kompas dalam Kasus Bom Bali," *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 4 No. 1, Universitas Pembangunan Nasional, Yogyakarta.
- Riyadi, Dody, 2005, Respons Organisasi Perempuan terhadap Perubahan Politik dari Era Orde Baru hingga Era Reformasi, *Tesis*, UGM, Yogyakarta.
- Sudibyo, Agus, 2004, *Kepentingan Ekonomi-Politik Media*, LKiS, Yogyakarta.
- Sujipto, Ani, Kebijakan Afirmatif, Kompas 10 Februari 2009.
- Supriyanto, Didik, Calon Perempuan, Wassalam, Kompas, 25 Agustus 2008.
- Kompas, edisi 25 Agustus 2008.
- Kompas, edisi 31 Januari 2009.
- Kompas, edisi 10 Februari 2009.
- Kompas, edisi 4 Maret 2009.